

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 187 /XII/2015/Tipidkor

Kepada : Yth. Para Kasubdit, Para Kasubag dan Para Kaur

Dari : Dirtipidkor Bareskrim Polri

Perihal : Undangan penyusunan ABK Dittipidkor Bareskrim Polri

1. Rujukan :
 - a. Peraturan Kapolri Nomor: 21 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri (Lampiran Q);
 - b. Sprint Dirtipidkor Nomor: 231/XII/2015/Tipidkor tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan personel yang masuk dalam tim pokja beserta anggotanya melakukan penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) pada Dittipidkor Bareskrim Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diharapkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam sprint tim pokja penyusunan ABK Dittipidkor Bareskrim Polri agar melaksanakan rapat penyusunan yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu, 23 Desember 2015
Pukul : 08.00 s.d selesai
Tempat : Aula Dittipidkor
3. Demikian untuk dilaksanakan

Jakarta, 21 Desember 2015

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS S.I.K., S.H., M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

LAPORAN NOTULEN

Dalam rangka

RAPAT PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KINERJA (ABK)
DITTIPITKOR BARESKRIM POLRI

I. Pelaksanaan :

1. Hari/tanggal : Rabu/23 Desember 2015;
2. Pukul : 08.00 s.d. 09.30 WIB;
3. Tempat : Aula Dittipidkor Bareskrim Polri;
4. Peserta : Sesuai Sprint

II. Hasil kegiatan :

Pembukaan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri Bapak Akhmad Wiyagus S.I.K., S.H., M.Si., M.M., mengenai penyusunan Analisis Beban Kinerja dilanjutkan dengan pembahasan Kasubagrenmin Dittipidkor Bareskrim Polri AKBP Dra. Sri Ningsih M.H prihal data-data rencana kebutuhan yang telah dikumpulkan/diserahkan oleh para Kasubdit, Kasubag dan Kaur sebagai bahan pembuatan ABK Dittipidkor Bareskrim Polri

1. KBP. Erwanto Kurniadi, S.H, M.H.,
 - Dalam pengisiannya Dittipidkor harus sungguh-sungguh karena kita telah menerima hak remunerasi lebih tinggi dibanding satker yang lain
 - Pembuatan ABK dimaksud harus mencakup pertelaan tugas secara rinci dan jelas
 - Kaurtu selaku pembinaan SDM, harus memiliki data yang akurat terkait SDM kita, jabatan apa yang sering kosong, maupun jabatan yang memiliki kriteria khusus untuk personel yang mengembannya.
 - Dalam penyusunannya tim harus menguasai rumus penentuan jumlah personel, beban kerja, dokumen pendukung, dll
 - Lakukan koordinasi dengan satker terkait penyusunan ABK dimaksud guna memperoleh hasil yang optimal
2. Kompol Andi Erma Suryono, S.I.K
 - Dari staf keuangan kekurangan 3 (tiga) orang Banum. Apakah Banum dimaksud dapat ditempati oleh Bintara atau hanya PNS Polri
 - Kekosongan dari Banum tersebut dimohon agar secepatnya bisa terisi guna percepatan penyelesaian tugas dikeuangan.
3. AKBP Sri Suhartini, S.H., M.H
Terkait pertanyaan Kaur keu, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu, dalam penyusunan ABK ini kita berdasarkan pada DSP yang telah ditetapkan. Dari

beban kerja dan banyaknya produk/giat yang dikerjakan apakah telah sesuai atau belum, selain itu juga untuk mengetahui kinerja tiap personel.

4. Penata Adik Wisnu

- Kondisi personel saat ini masih kurang 35 personel
- Namun untuk personel PNS telah terpenuhi yaitu 18 personel
- Ada beberapa jabatan yang tidak ada pada struktur organisasi namun masih ditempatkan personel bertugas, misalkan ajudan dan spri
- Untuk pengisian Banum pada keuangan dapat diisi oleh anggota Polri pangkat Bintara karena untuk PNS telah cukup sesuai DSP yaitu 18 personel. Namun untuk lebih jelasnya, akan kami koordinasikan kembali.

5. AKBP Dra. Sri Ningsih M.H

- Sebelumnya kami dari Subagremis mengucapkan terimakasih atas kerja samanya dalam mengumpulkan data-data pendukung yang kami butuhkan dalam penyusunan ABK ini, Namun perlu kami pertegas bahwa, apabila ada saran masukan maupun kendala dalam DSP yang telah ada saat ini, dapat kami tampung untuk kedepannya bahan kami dalam menyusun pertelaan staf.
- Dinamika kejahatan tindak pidana Korupsi saat ini terus berkembang, sehingga dari segi SDM, dukungan sarpras, anggaran dll juga harus ikut berkembang.

III. Kesimpulan

Hasil rapat yang telah dibahas dan didiskusikan dengan pertimbangan-pertimbangan pada prinsipnya menyetujui serta menindaklanjuti dengan penyempurnaan draf ABK lebih lanjut sebelum pengesahan.

IV. Penutup

Demikian notulen rapat penyusunan ABK Dittipidkor Bareskrim Polri, disusun untuk diketahui dan ditindak lanjuti penyelesaiannya.

Jakarta, 23 Desember 2015

NOTULEN



Dra. Sri Ningsih., M.H
AKBP NRP. 165030759



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 231 /XII/2015/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kinerja Dittipidkor Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri (lampiran "Q" Bareskrim Polri);
 - b. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Analisis Beban Kinerja dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DIPERINTAHKAN

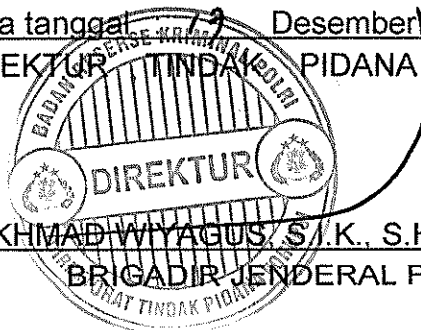
Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, NIP DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Analisis Beban Kinerja personel Dittipidkor Bareskrim Polri;
 2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., S.H., M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



DAFTAR NAMA-NAMA TIM POKJA PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KINERJA
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI T.A. 2015

NO	NAMA	PANGKAT NRP/NIP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM TIM
1	AKHMAD WIYAGUS, S.I.K, S.H.,M.Si, M.M.	BRIGJEN POL	DIREKTUR DITTIPIDKOR	PENANGGUNG JAWAB
2	ERWANTO KURNIADI, S.H.,M.H.	KOMBES POL 67040408	WADIR TIPIDKOR	KETUA
3	Drs. DJOKO POERWANTO	KOMBES POL 67110285	KASUBDIT II	WAKIL KETUA
4	ADI DERIYAN JAYAMARTA, S.I.K.,M.H.	KOMBES POL 72060458	KASUBDIT I	ANGGOTA
5	CAHYONO WIBOWO	KOMBES POL 68020336	KASUBDIT III	ANGGOTA
6	ENDAR PRIANTORO , S.H., S.I.K., CFE, M.H.	KOMBES POL 73060310	KASUBDIT IV	ANGGOTA
7	INDARTO, S.H., S.Sos, S.I.K., M.Si	AKBP 73110414	KASUBDIT V	ANGGOTA
8	Dra. SRI NINGSIH, M.H.	AKBP 65030759	KASUBBAGRENMI N	SEKRETARIS
9	SRI SUHARTINI, S.H., M.H.	AKBP 60061030	Pgs. KASUBBAGOPS	ANGGOTA
10	ANDI ERMA SURYONO, S.I.K.	KOMPOL 79111158	KAURKEU	ANGGOTA
11	ADIK WISNU, S.H.	PENATA 197703192006041003	KAURTU	ANGGOTA
12	MARYOTO, S.H.	PENATA I 196306201987031001	PAUR SUBBAGOPS	ANGGOTA
13	LIS ANDRIATI, SH	PENATA 196307301988032001	PAMIN URKEU	ANGGOTA
14	HERAWATI	PENDA I 197211101994032002	PAMIN URTU	ANGGOTA
15	EDY PARIYANTO, S.H.	PENGDA I 198212132009101001	BANUM SUBBAGRENMIN	EDY PARIYANTO, S.H.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2015

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

DIREKTUR
AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., S.H., M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**BADAN RESEKSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

DOKUMENTASI PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KINERJA

